

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar berada di posisi yang sangat strategis. Posisi yang diapit oleh Benua Asia dan Benua Australia, dan berada antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menempatkan Indonesia posisi silang dunia yang berfungsi sebagai *Sea Lanes of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT). Potensi strategis atas posisi Indonesia membawa konsekuensi munculnya sejumlah tantangan terutama pada keamanan maritim. Indonesia yang memiliki konstelasi geografis yang terbuka dan berbatasan langsung dengan negara-negara di sekitarnya menciptakan dua kondisi berbeda bagi Indonesia. Kondisi strategis dapat memperoleh berbagai keuntungan bagi Indonesia baik secara ekonomi, hingga sosial dan budaya. Akan tetapi, di saat yang bersamaan juga dapat memberikan ancaman bagi kedaulatan Indonesia dalam ancaman kejahatan tradisional maupun non-tradisional. Ada pula ancaman keamanan yang terkemuka saat ini bersumber dari isu-isu konflik di Laut China Selatan (LCS) yang berpengaruh terhadap tatanan maritim di dalam negeri maupun internasional.¹

Melalui dua kondisi bertentangan yang dihadapi, tentunya pemerintah Indonesia sebagai kepala negara mengeluarkan kebijakan yang dipengaruhi oleh

¹ Mulyadi, "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Perspektif Keamanan Maritim," *Jurnal Maritim Indonesia*, no.1 (Juni 2020): 24-34. DOI: <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i1.49>.

kepentingan geopolitik negaranya. Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mencetuskan doktrin Poros Maritim Dunia (PMD) yang berorientasi pada isu keamanan maritim. Gagasan Poros Maritim Dunia pun mulai dicetuskan pada saat pertemuan *9th East Asia Summit* yang dilaksanakan di Naypyidaw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Doktrin PMD tersebut menguraikan beberapa strategi yang tertuang dalam lima pilar utama yaitu; pertama, pembangunan budaya maritim dalam sektor pelayaran dan pariwisata. Kedua, komitmen memelihara dan melindungi sumber daya laut dan pengelolaan kedaulatan pangan yang mengutamakan nelayan. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan hubungan maritim sebagai prioritas. Keempat, mengutamakan diplomasi khususnya bidang maritim melalui implementasi kerja sama dan upaya penanganan konflik bidang maritim. Kelima, mengutamakan pembangunan kekuatan maritim dalam hal menjaga otonom dan keamanan maritim, serta keselamatan pelayaran.²

Melalui doktrin PMD terlihat bahwa adanya ambisi ekspansi dalam pertahanan luar negerinya. Penyampaian doktrin PMD merupakan langkah penting dalam perwujudan pemahaman Presiden Jokowi terhadap kawasan strategis negara dilihat dari geopolitik dan geostrategi Indonesia. Melihat bahwa maritim merupakan bagian sangat penting bagi kekuatan nasional dan pusat interaksi keamanan internasional maka perwujudan tersebut menunjukkan ekspansi dalam

² “Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>. (Diakses 22 Februari 2022).

bidang maritim yang tidak hanya mencakup kawasan Asia Tenggara, tetapi juga meluas hingga ke kawasan Asia Pasifik.

Ekspansi yang meluas ke kawasan Asia Pasifik tidak lepas dari adanya perubahan geopolitik di kawasan yang mempengaruhi doktrin PMD. Terjadinya perubahan isu-isu geopolitik meliputi kebangkitan negara-negara besar seperti persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia khususnya yang berkaitan dengan konflik di Laut China Selatan. Adanya perbedaan kepentingan negara kekuatan besar menciptakan situasi pelik, hal ini terlihat pada perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* sebagai strateginya membangun hegemoni di kawasan Asia Pasifik. Ada pula Amerika Serikat beserta negara sekutu lainnya melalui terminologi Indo-Pasifik yang merupakan strategi transformasi geopolitik kawasan Asia Pasifik sebagai perimbangan untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan.³

Turbulensi lingkungan yang kompleks telah berdampak serius terutama pada keamanan negara sekitar kawasan, termasuk Indonesia. Untuk menghadapi situasi dimanis tersebut, Indonesia menyikapi dengan orientasi sebagai negara yang letaknya strategis dan dinamis di kawasan menekankan dimensi politik luar negeri. Langkah Presiden Jokowi dalam mencetuskan gagasan PMD menjadikan Indonesia yang berada di titik persilangan kegiatan jalur lalu lintas dunia, banyak

³ Yanyan M.Yani, dan Ian Montrantama, “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Politik,” *Jurnal Pertahanan*, no. 2 (Agustus 2015): 25-51. <https://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v5i2.356>.

diperebutkan oleh negara-negara dunia yang berkepentingan ingin menjalin kerja sama terutama di bidang maritim. Maka situasi ini dimanfaatkan oleh Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan dan pembangunan maritim dalam negeri sebagai perwujudan ekspansi pertahanan luar negerinya.⁴

Indonesia sebagai negara kekuatan menengah tidak dapat hanya mengandalkan sumber daya dalam negeri saja untuk mengoptimalkan keamanan dan pembangunan maritim, maka perlunya pemanfaatan kerja sama dari banyak negara yang memiliki kekuatan yang lebih unggul salah satunya seperti Jepang. Secara geografis letak Indonesia dan Jepang tidak berdekatan, namun kondisi geografis dan geopolitik yang hampir serupa membuat Indonesia memilih Jepang sebagai mitra kerja samanya. Jepang sebagai salah satu negara maju di benua Asia sangat diperhitungkan untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang. Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun lamanya sejak 1958 melalui kesepakatan perjanjian damai. Kerja sama kedua negara telah dijalin di berbagai bidang mulai dari ekonomi, sosial-budaya, pertahanan hingga di tahun 2015 Indonesia menyepakati kerja sama maritim dengan Jepang melalui pembentukan forum tingkat tinggi.⁵

Menindaklanjuti visi PMD, tahun 2015 Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan melalui undangan resmi dari pemerintah Jepang oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Agenda hubungan bilateral tersebut membahas

⁴ Ibid.

⁵ “Kishida and Indonesia’s Jokowi seek enhanced security and economic ties,” *News2u Holdings, Inc*, <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/12/national/kishida-indonesias-jokowi-see-enhanced-security-economic-ties/html> (Diakses 20 Februari 2022).

penguatan kerja sama mulai dari bidang politik, ekonomi, infrastruktur, industri, hingga kemaritiman dengan dilanjutkan penandatanganan kerja sama *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Presiden Jokowi dan PM Shinzo Abe. Setelah pertemuan konferensi pers dan penandatanganan MoU, para pemimpin Indonesia dan Jepang telah sepakat untuk meluncurkan sebuah forum dalam mewujudkan lingkungan maritim yang terbuka dan stabil. Kedua pemerintah pula menegaskan kerja sama ini mempersoalkan isu keamanan maritim yang muncul seperti *illegal fishing*, perompakan, hingga persengketaan wilayah teritorial.⁶

Perwakilan dari Indonesia kembali melakukan kunjungan kerja ke Jepang selama dua hari pada 20 dan 21 Desember 2016 melalui pertemuan para menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Maritim, Luhut Pandjaitan serta didampingi beberapa pejabat tinggi lainnya untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida dalam membahas agenda utama kerja sama. Pada 21 Desember 2016 pertama kalinya diresmikan pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) oleh Menko RI Luhut Pandjaitan dan Menlu Jepang Fumio Kishida melalui penandatanganan kerangka *Memorandum of Cooperation to Establish Indonesia – Japan Maritime Forum*.⁷

Perwujudan kerja sama melalui forum maritim ini sangat penting untuk kedua negara terutama bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang terletak di

⁶ “Japan-Indonesia Joint Statement on Strengthening Strategic Partnership,” *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, <https://www.mofa.go.jp/files/100002843.pdf.html>. (Diakses 21 Februari 2021).

⁷ “Indonesia-Jepang Bentuk Indonesia-Japan Maritime Forum,” *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI*, <https://maritim.go.id/indonesia-jepang-bentuk-indonesia-japan-maritime-forum/.html>. (Diakses 22 Februari 2022).

posisi silang dunia sangat rawan dari sisi keamanan laut, maka Indonesia harus dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki agar mampu meningkatkan keamanan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia terutama di tengah kebangkitan dan persaingan negara besar yang semakin agresif. Setiap negara termasuk Indonesia akan melakukan apa pun agar kepentingan nasional mereka dapat terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti alasan pembentukan sebuah forum bilateral maritim melalui kerja sama dengan Jepang sebagai wujud dalam pemenuhan tujuan dan kepentingan Indonesia dalam menghadapi ancaman eksternal di perairan kawasan. Maka dalam penyusunan skripsi, peneliti mengambil judul **“Kepentingan Indonesia terhadap Jepang dalam Pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF)”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa kesepakatan kerja sama melalui pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) di tahun 2015 menunjukkan adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia dalam mengembangkan domain maritim dan mempertahankan kedaulatan teritorial Indonesia di tengah berbagai ancaman keamanan maritim yang timbul. Peneliti pula ingin memahami lebih jauh pelaksanaan implementasi yang telah dihasilkan melalui IJMF sebagai sarana dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Oleh karena itu, peneliti mengemukakan sebuah pertanyaan penelitian yaitu: Apa kepentingan Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang dalam pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi IJMF yang digunakan sebagai sarana bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan teritorialnya khususnya yang dihadapkan pada dampak dari persaingan negara kekuatan besar terutama isu keamanan maritim. Peneliti menjelaskan kepentingan Indonesia yang ingin meningkatkan material domain maritim dalam negeri agar dapat menghadapi kebangkitan negara besar di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia menyepakati kerja sama melalui pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) karena Jepang sebagai negara yang dianggap mampu membantu Indonesia menghadapi persoalan Tiongkok yang telah melanggar hak kedaulatan wilayah teritorialnya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai manfaat dan kegunaan kepada para pembaca. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan bahwa kepentingan nasional menjadi faktor utama dalam menjalin kerja sama antarnegara di tengah kondisi eksternal yang dipenuhi oleh konflik. Dukungan dari berbagai aktor/lembaga pemerintahan suatu negara juga memberikan kontribusi penting di dalam pelaksanaan kerja sama internasional untuk mewujudkan kepentingan nasional negaranya.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN: Pada bagian pertama peneliti menjelaskan mulai dari latar belakang sebagai tema yang diangkat dalam penelitian, kemudian memunculkan rumusan masalah yang dijadikan sebagai pertanyaan penelitian, dan diikuti dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta diakhiri dengan penjelasan gambaran umum dalam sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA BERPIKIR: Pada bagian kedua, peneliti menjelaskan tinjauan pustaka yang menjabarkan sudut pandangan penulis dari penelitian-penelitian terdahulu berguna sebagai referensi dan membangun pemahaman awal terhadap topik penelitian. Adapun teori dan konsep pada bagian ini yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis hasil dan pembahasan pada bab IV.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bagian ketiga, berisikan pendekatan dan metodologi penelitian untuk menganalisis hasil dan pembahasan. Bab ini juga menjelaskan teknik proses pengumpulan data untuk mengolah data, serta menuangkannya, dan menganalisis hasil dan pembahasan. Peneliti mengumpulkan informasi dan data melalui situs daring dan kunjungan ke perpustakaan, kemudian memahami dan mengelompokkan ke dalam kategori subbab penelitian yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berdasarkan perolehan data untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Pada bagian keempat, berisi pembahasan dan analisis yang peneliti bagi ke dalam tiga subbab terkait topik “Kepentingan Indonesia Terhadap Jepang melalui Pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF)” yaitu; (1) Isu Keamanan Maritim di Wilayah Asia Pasifik Yang

Mengancam Kedaulatan Teritorial Indonesia. (2) Pembentukan IJMF Sebagai Instrumen Meningkatkan *Bargaining Position* Indonesia. (3) IJMF Sebagai Diplomasi Maritim.

BAB V PENUTUP: Pada bagian kelima, peneliti akan menarik konklusi dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Bagian ini juga memberikan saran singkat peneliti bagi pihak-pihak terkait dan bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

